

Pendidikan Berbasis Budaya Cirebon

Ibnu Rusydi

Fakultas Agama Islam

Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia

Email: ibnurs@gmail.com

Abstrak

Sebagai proses transformasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan pribadi individu yang mampu memaknai dirinya, masyarakat, dan bangsanya, pendidikan hendaknya ditanamkan kepada pribadi anak didik dari jati diri dan identitas luhur bangsanya. Nilai-nilai kebudayaan bangsa ini dapat dijadikan sebagai sumber daya intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam budaya Cirebon, nilai-nilai luhur kebudayaannya sangat potensial untuk dijadikan 'spirit' yang melandasi setiap aktifitas pendidikan sekaligus menjadi objek nilai yang akan ditransformasikan. Sintesis dan perpaduan antara nilai-nilai tradisional (agama) dan nilai-nilai modernitas tercermin dalam produk dan sejarah kebudayaan Cirebon. Perpaduan dua nilai inilah yang merupakan karakter khas yang ditemukan dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon. Karena itu, pendidikan berbasis budaya Cirebon selalu mengupayakan lahirnya peserta-didik yang mampu memahami dan mempertahankan jati dirinya sebagai anak suku bangsa namun ternyata tidak kaku dalam mengarungi arus modernisasi dan globalisasi.

Abstract

As the process of transformation values for the creation of private individuals who are able to make sense of themselves, society, and nation, education should be imparted to student's personal identity and the identity of the noble nation. The values of this nation's culture can be used as a power source of intellectual, emotional, and spiritual. In the culture of Cirebon, noble values culture very potential to be 'spirit' that underlies any educational activities at the same time become the object of value to be transformed. Synthesis and a blend of traditional values (religion) and the values of modernity is reflected in the products and the cultural history of Cirebon. The combination of the two values is what is the distinctive character found in the body of Cirebon culture. Therefore, culture-based education Cirebon is always seeking the birth of participant-learners who

are able to understand and maintain their identity as a child of tribes but it is not rigid as it navigates the currents of modernization and globalization.

Keywords: *Education, Culture of Cirebon, Identity, Globalization*

Dalam catatan sejarah, saat awal pertama kali kota Cirebon dibangun, orang-orang dari berbagai daerah, Sunda, Jawa, Sumatera, Luar Jawa seperti India, Cina, Persia, Irak, Arab, dan Syam (Siria) mendatangi kota ini.¹ Budaya Cirebon lahir dari persenyawaan berbagai budaya yang datang dari berbagai daerah dan tempat. Akulturasi dan asimilasi budaya ini merupakan spirit utama pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat Cirebon. Pada zamannya, budaya masyarakat Cirebon sudah memasuki wilayah 'post-modernis'.² Masyarakat yang terbuka, kreatif dalam memadukan beragam unsur budaya, dan memformulasikannya secara khas yang kelak dinamai budaya Cirebon.

Di era teknologi dan informasi ini, kemampuan untuk terus berinovasi dan produktif adalah tuntutan yang niscaya. Tanpa kemampuan beradaptasi dengan kemajuan dan modernitas maka budaya lokal dan *local wisdom*-nya akan punah tanpa bisa turut mewarnai kehidupan generasi muda. Namun demikian, kemampuan memadukan dan menyerap budaya-budaya modern harus tetap diimbangi dengan kemampuan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Tanpa keseimbangan semacam ini maka keterasingan budaya akan terjadi, terasing dari identitas dan jati dirinya sendiri. Sejarah pembentukan kebudayaan Cirebon mengajarkan betapa masyarakat mampu tampil sebagai orang-orang yang terbuka, siap menerima hal-hal baru yang positif, dan memformulasikannya menjadi kebudayaan Cirebon yang khas.

Masyarakat harus sadar akan identitas dirinya melalui penghayatan dan pengamalan kebudayaan. Tanpa kesadaran jati diri, individu akan terombang-ambing dalam arus globalisasi yang dahsyat dengan gelombang informasinya yang tak terbandung. Pada titik inilah, upaya transformasi nilai-nilai kebudayaan menjadi niscaya, sehingga media pendidikan harus ditempatkan pada posisi yang prioritas. Tujuan utama dari pendidikan itu sendiri diarahkan supaya individu mampu memaknai dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya.³ Kemampuan memberi makna adalah indikasi adanya kesadaran akan identitas diri.

Individu (masyarakat) dan nilai-nilai budaya bagaikan dua tepi yang harus dijembatani. Jembatan penghubung dua tepi ini disebut pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Jean Piaget, pendidikan diumpamakan sebagai penghubung

dua sisi. Sisi pertama adalah individu yang terus tumbuh dan berkembang, dan sisi kedua adalah nilai-nilai sosial, intelektual, dan moral yang *taken for granted*. Dua sisi ini akan dijembatani dan dihubungkan oleh media pendidikan.⁴

Pendidikan tanpa nilai-nilai budaya bagaikan *bertepuk sebelah tangan*. Pendidikan tanpa orientasi nilai-nilai adalah omong kosong yang mustahil. Karena itulah, tak berlebihan apabila Ary H. Gunawan mendefinisikan pendidikan sebagai proses sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap, dan keterampilan.⁵ Tindakan atau proses sosialisasi tanpa adanya ‘bahan’ yang akan disosialisasikan adalah mustahil. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya dalam pengertiannya yang luas harus ada dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai budaya.

Di samping itu, nilai penting pendidikan berbasis budaya adalah dapat diibaratkan sebagai tameng dan senjata bagi individu yang hidup di jaman informasi dan teknologi ini. Dengan pendidikan berbasis budaya ini, individu maupun masyarakat dapat mengenal identitas budaya sendiri, sehingga selanjutnya dapat memetakan antara hal-hal baru yang boleh diterima dan harus ditolak. Filterisasi kebudayaan semacam ini akan membantu pengembangan kebudayaan ke depan. Pengembangan kebudayaan harus melalui beberapa tahapan, mulai tahap kesadaran jati diri, filterisasi kebudayaan asing, dan asimilasi maupun akulturasi. Tahapan-tahapan seperti ini mencerminkan proses pembentukan kebudayaan yang berkarakterkan “mempertahankan budaya lama yang masih baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik.” Pengembangan kebudayaan harus didukung oleh individu-individu yang mau mengembangkannya.⁶

Pendidikan berbasis nilai-nilai budaya ini tidak berangkat dari ruang kosong. Perjalanan sejarah kebudayaan Cirebon menjadi saksi bisu betapa masyarakat telah menjalani, menghayati, dan mempraktekkan sistem pendidikan berbasis budaya lokal. Wujud konkret produk pendidikan berbasis budaya lokal ini dapat dilihat pada kesenian-kesenian lokal, tradisi, dan adat-istiadat yang masih dipertahankan dari generasi ke generasi. Proses tranmisi dari generasi ke generasi ini—sehingga nilai-nilai budaya tetap bertahan dalam rentangan waktu yang panjang—adalah praktek pendidikan yang paling substantif. Karena, kata Jean Peaget, individu akan terus berkembang dari sejak lahir dan terus berkembang, dan pada saat yang sama dunia pendidikan bertanggungjawab mendorongnya ke nilai-nilai budaya (nilai sosial, intelektual, moral).⁷

Hal ini menjadi landasan filosofis bagi masyarakat Cirebon untuk terus melanjutkan dan mengembangkan suatu model pendidikan berbasis kebudayaan

lokal. Pendidikan yang menekankan pada transformasi nilai-nilai budaya akan menghasilkan output-output pendidikan yang berakar karakter kuat, selektif, produktif, dan kreatif. Bahkan, melalui pendidikan berbasis kebudayaan ini, dapat diharapkan individu akan mampu melawan berbagai kekuatan yang membatasi perkembangan dirinya, terutama yang diatur oleh kekuatan kapitalisme,⁸ sebagai salah satu kekuatan ideologis yang menyertai setiap gerak langkah modernitas.

Secara eksplisit maupun implisit, pendidikan berbasis budaya lokal ini tetap sejalan dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 No. 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁹

Dari uraian di atas terdapat dua masalah pokok. Pertama, pendidikan di era globalisasi—yang ditandai dengan deras arus informasi dan nilai-nilai asing—diharapkan mampu melahirkan generasi yang memahami jati diri dan identitas budayanya sendiri. Dengan kemampuan memahami identitas budaya dan jati diri sendiri, individu diharapkan mampu melakukan filterisasi terhadap nilai-nilai budaya baru yang negatif dan tidak bersifat konstruktif. Kedua, sejarah mencatat bahwa masyarakat Cirebon adalah masyarakat yang terbuka, plural, hidup berdampingan secara rukun dalam menjalankan nilai-nilai budayanya sendiri sehingga lahirlah kebudayaan baru sebagai hasil dari perpaduan beragam budaya. Dari kondisi masyarakat yang sangat heterogen semacam itu lahirlah suatu kebudayaan baru yang khas, yakni budaya Cirebon.

Mengingat tulisan ini mengangkat tema pendidikan berbasis budaya Cirebon, maka uraian pembahasan akan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni: tujuan pendidikan, pendidikan berbasis budaya, nilai-nilai budaya Cirebon yang bisa dijadikan sumber daya utama untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal.

Tujuan Pendidikan

Secara fisik, manusia akan terus tumbuh berkembang, bagian-bagian tubuhnya semakin membesar. Makanan dan asupan gizi membantu perkembangan manusia secara fisik. Secara psikis, perkembangan dan pertumbuhan manusia harus dibantu melalui media pendidikan. Keterbelakangan pendidikan

menyebabkan perkembangan kejiwaan seseorang terlambat. Dalam konteks ini, pendidikan harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas, bukan sekedar mendapat pelajaran di bangku sekolah dan kuliah. Pendidikan diartikan sebagai proses mendewasakan manusia, memberinya kesadaran kritis, kemampuan untuk memaknai dirinya, lingkungan, dan masyarakat. Dengan ungkapan lain, pendidikan bagaikan asupan gizi yang membantu pertumbuhan kesadaran seseorang, baik kesadaran intelektual, emosional, maupun spiritual.

Dalam rangka melahirkan individu ideal seperti itu, pendidikan sangat tidak layak apabila harus dimaknai dalam pengertian dan praktek yang sangat sempit, semisal anak didik diposisikan sebagai “Bank Data” untuk menyimpan dan menampung segala informasi dari tenaga pengajar (guru). Pendidikan ala Bank semacam itu dikritik habis-habiskan oleh salah satu pakar pendidikan ternama, Paulo Freire.¹⁰ Dalam dunia pendidikan ala Bank yang digambarkan dalam teori Paulo Freire ini, anak didik mirip sekali dengan korban, objek mati, tempat penyimpanan data. Keterlibatan dari anak didik sangat minim, sehingga pikiran yang terbuka, kesadaran kritis, berpandangan luas ke depan, cakrawala yang luas, menjadi omong kosong. Tenaga pengajar berperan layaknya manusia supergenius, sumber pengetahuan dan informasi.

Tugas dunia pendidikan memang berat namun mulia. Keberhasilan dunia pendidikan akan berdampak besar dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, adalah logis apabila berdasarkan UUD 1945 “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”¹¹ Manfaat besar yang pasti diperoleh apabila dunia pendidikan berhasil mengerjakan cita-citanya adalah terciptanya insan yang cinta tanah air, munculnya rasa nasionalisme, dan kepedulian kepada seluruh aset bangsa. Bagi anak bangsa yang terdidik dengan baik, segala aset yang dimiliki bangsa akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kebesaran bangsanya. Tidak akan dikorupsi demi kepentingan pribadi maupun kelompok.¹²

Anak didik yang hanya dibekali dengan informasi-informasi tanpa dibarengi kesadaran kritis dan kepedulian sosial akan rapuh menghadapi kondisi jaman yang sudah rusak. Realitas sosial kini terlanjur menampilkan kontradiksi yang mencolok, jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat dalam, seruan untuk memegang teguh moralitas berseberangan dengan meningkatkan tindakan amoral dan kriminalitas, penegakan hukum dan keadilan bertabrakan

dengan merajalelanya KKN. Di jaman yang sudah rusak semacam inilah, pendidikan diharapkan menjadi *keeper* gawang kebenaran, *problem solver* setiap probelmatika kehidupan, dan proaktif dalam mengarahkan masyarakat yang hampir disorientasi.¹³

Satu-satunya cara untuk merekonstruksi struktur masyarakat yang ‘amburadul’ ini adalah dengan menyiapkan individu-individu yang berpendidikan. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya membekali anak didik dengan kecakapan, keahlian, skill, dan kemampuan yang memadai untuk membangun bangsa menuju arah yang lebih baik. Membangun bangsa dengan segala detail persoalan yang dihadapinya, tentu membutuhkan individu-individu yang luar biasa, cakap, dan berkemampuan. Di sinilah, pendidikan adalah tindakan menyiapkan individu yang memiliki kecakapan dan kemampuan. Dengan begitu, output-output pendidikan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarahkan gerak pembangunan bangsa.¹⁴

Seperti yang telah disampaikan di awal, pendidikan bertujuan untuk memberikan kemampuan memaknai bagi individu, baik memaknai dirinya, lingkungan, maupun masyarakat. Dengan kemampuan memaknai inilah, output dunia pendidikan akan mulai menganalisa, memetakan, dan mencarikan solusi bagi setiap problematika yang dihadapi. Dari sini kemudian dapat berkembang lebih jauh, yaitu turun aksi untuk mengarahkan perputaran roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan dan ditujukan untuk mencetak insan yang berkesadaran akan hal-hal yang menindas kehidupan dan menemukan jalan keluar menuju pembebasan yang sesungguhnya.

Mirip seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire, pendidikan membuat penindasan dan menyebabkan menjadi objek refleksi kaum tertinas, dan dari refleksi itulah lahir pembebasan (*liberation*).¹⁵ Penindasan dapat diartikan dalam pengertian yang lebih luas. Kebodohan adalah penindasan. Ketidakadilan hukum adalah penindasan. Kemiskinan adalah penindasan. Gizi buruk adalah penindasan. Dan, masih banyak lain mengenai jenis penindasan ini. Dunia pendidikan akan menyiapkan kader-kader yang mampu menghancurkan segala macam penindasan ini, dan mencarikan *problem solving*-nya.

Bangsa kita ini sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan khazanah kebudayaan yang beragam. Nusantara ini adalah lumbung kebudayaan dan tradisi. Di satu sisi memang dapat dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan dalam kehidupan ini. Namun, di sisi lain, terdapat satu kelemahan dan hambatan, yaitu menyamaratakan tingkat kesadaran. Di pelosok-pelosok terpencil,

tingkat kesadaran kritis masyarakatnya berbeda jauh dari mereka yang hidup dan mendiami daerah perkotaan yang metropolitan. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah pedalaman belum terjangkau dengan baik oleh dunia pendidikan.

Ketimpangan realitas semacam ini bukan lagi sebagai anugerah yang patut dibanggakan. Dari kacamata Paulo Freire, realitas tersebut harus menjadi objek reflektif semua orang, dari berbagai lapisan masyarakat, terutama oleh pemerintah dan praktisi pendidikan. Dalam konteks tulisan ini, ketimpangan realitas tersebut ditempatkan sebagai musuh dunia pendidikan, dimana output-output dunia pendidikan adalah untuk memerangi dan meniadakan realitas semacam itu.

Dengan mengikuti alur logika Paulo Freire yang membagi tipe pendidikan ke dalam tiga macam: pendidikan magis, pendidikan naif, dan pendidikan kritis,¹⁶ maka boleh dikata sebagian masyarakat masih berada dalam kategori masyarakat magis dengan tipe pendidikan yang magis pula. Masyarakat yang berkesadaran magis adalah tipologi masyarakat yang hanya tahu bahwa nasib mereka sudah ditentukan oleh takdir Tuhan, sehingga mereka tidak punya kuasa untuk merubahnya. Masyarakat yang berkesadaran naif setingkat lebih baik dari masyarakat magis. Mereka sudah tahu akan persoalan dan bagaimana konsep memecahkan persoalan hidupnya. Namun, mereka apatis, acuh tak acuh, dan membiarkan persoalan itu berlarut-larut. Di sinilah peran pendidikan yang sejati, yaitu menumbuhkan kesadaran kritis dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk bertindak guna merubah keadaan dan menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.

Dalam konteks nasionalisme, pendidikan bertujuan untuk menciptakan kepedulian dan kecintaan akan tanah air, mendorong setiap individu untuk memikirkan pernak-pernik persoalan yang dihadapi bangsa, lalu turun tangan dan bertindak secara lebih konkret untuk menyelesaikannya. Sependapat dengan pendapat Mansour Fakih yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan transformasi sosial dalam keseluruhan sistem perubahan sosial yang ada. Dalam rangka melahirkan transformasi sosial tersebut, pendidikan harus melakukan analisis struktural lokasi pemihan terlebih dahulu. Selanjutnya, dunia pendidikan memetakan atau identifikasi isu-isu strategis dan menetapkan visi. Menurut Mansour Fakih, tahapan-tahapan ini sangat penting, sehingga pemberdayaan betul-betul terarah dengan baik.¹⁷

Pelajaran penting yang bisa diambil dari pandangan Mansour Fakih, yang masih relevan dan kontekstual di jaman sekarang, adalah keharusan dunia pendidikan mengidentifikasi isu-isu strategis. Di jaman yang sarat dengan

kepentingan dan nilai-nilai kapitalisme, sering kali pendidikan dijadikan komoditi yang bisa diperjual-belikan, diperdagangkan demi keuntungan finansial, tanpa ada niatan tulus untuk pemberdayaan. Tak jarang, kepentingan kapitalisme semacam itu bertopeng dan bersembunyi di balik jargon pemberdayaan. Dampaknya sangat nyata, orang miskin tak boleh bersekolah yang tinggi-tinggi. Realitas ini membuat banyak orang berteriak lantang menyuarakan kebenaran etis, bahwa komersialisasi pendidikan adalah tindakan merampas hak setiap manusia untuk mendapatkan hak berpendidikan.¹⁸

Pertanyaannya, bagaimana jika seandainya institusi pendidikan sudah terlanjur dikomersialisasikan? Bagaimana seandainya lembaga sekolah dan perguruan tinggi sudah terjebak dalam lingkaran kepentingan kapitalisme, dan dengan argumentasi-argumentasi logis mereka membenarkan praktek komersialisasi pendidikan tersebut? Pada saat bersamaan, pemerintah melanggengkan praktek komersialisasi ini?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita harus kembali merenungkan substansi jawaban ekstrem dari Ivan Illich yang disebut *de-schooling society*. Ivan Illich mengatakan bahwa apabila pendidikan yang berlangsung di dalam lembaga sekolah sudah menampakkan karakternya sebagai pendidikan yang militeristik, maka keluar dari lembaga pendidikan semacam itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Menurut Ivan, berlama-lama berada di dalam proses pendidikan semacam itu akan memperburuk keadaan.¹⁹ Sejatinya, pandangan ekstrem Ivan Illich itu tidak ditujukan untuk mendorong orang-orang apatis terhadap lembaga pendidikan dan meninggalkan dalam arti yang sebenarnya. Pandangan Ivan Illich sejatinya adalah kritik tajam kepada lembaga pendidikan agar lebih humanis dan berwajah santun, jangan sampai menampakkan wajah sebagai penjara intelektual.²⁰

Humanisme yang semestinya diperjuangkan institusi pendidikan adalah pemberdayaan dan memanusiakan manusia, serta memberikan kesempatan penuh pada setiap manusia dari berbagai lapisan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Karenanya, dan dalam konteks ini, komersialisasi pendidikan adalah musuh yang harus diperangi oleh dunia pendidikan itu sendiri. Sebab, komersialisasi bertentangan dengan visi dan cita-cita luhur dunia pendidikan. Atau paling tidak, komersialisasi pendidikan mereduksi cita-cita tersebut. Tanpa adanya unsur komersialisasi dan disertai perjuangan keras demi pemberdayaan manusia maka institusi pendidikan boleh dikata telah berjalan di jalan yang semestinya, yaitu jalan yang menuju ke arah pembentukan manusia seutuhnya. Memang

benata, tak ada manusia sempurna. Namun, melalui pendidikan, kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir akan dapat diperbaiki, dan dari waktu ke waktu defisit kemanusiaan tersebut dapat ditambal.²¹

Pendidikan Berbasis Budaya

Apabila tujuan pendidikan secara ringkas dapat dirangkum sebagai upaya mendewasakan manusia, memanusiakan manusia, menanamkan kesadaran kritis, memberikan kemampuan memaknai diri, lingkungan, dan masyarakat, maka nilai-nilai budaya adalah landasan bagi keseluruhan proses tersebut. Nilai-nilai budaya menjadi batasan bagi ruang lingkup dimana gerak kesadaran harus dibatasi. Dengan kata lain, manusia yang dewasa, manusia yang benar-benar manusiawi, manusia yang kritis, dan manusia yang sadar akan jati dirinya, adalah manusia yang berbudaya, bertindak sesuai nilai-nilai budaya, berjuang demi dan untuk nilai-nilai budaya. Dalam batasan ini, pendidikan adalah proses transformasi informasi-informasi sekaligus nilai-nilai budaya, pembudayaan manusia, penguatan nilai-nilai kebudayaan melalui usaha tanpa henti menanamkan kesadaran budaya dalam diri anak didik.

Hubungan antara pendidikan dan nilai-nilai kebudayaan bagaikan hubungan instrumen dan fungsi, mediasi dan tujuan, perjalanan dan akhir. Membicarakan pendidikan maka kebudayaan sudah *include* di dalamnya. Melihat praktek pendidikan selalu berlangsung di dalam dan dibatasi oleh ruangan yang disebut ruang kebudayaan. Pendidikan tidak pernah ditujukan untuk sekedar menghasilkan manusia-manusia terdidik (*educated human being*) melainkan juga manusia berbudaya (*civilized human being*). Untuk itulah, dengan ringkas H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa proses pendidikan adalah upaya pembudayaan.²² Manusia yang ideal dalam idealisme pendidikan adalah manusia yang cerdas pandai sekalipun kuat mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai kebudayaannya. Boleh dikata pendidikan dan kebudayaan bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Rasionalisasi relasi antara pendidikan dan nilai-nilai kebudayaan adalah bahwa pendidikan dijalankan oleh, untuk, dan demi manusia (masyarakat). Dalam diri masyarakat terdapat cita-cita, harapan, nilai-nilai idealisme, dan keyakinan. Semua ini menjadi ruh kehidupan masyarakat. Sementara itu, pendidikan berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai, harapan, keyakinan tersebut. Bahkan boleh dikata, dunia pendidikan adalah sus-sistem dari struktur kesadaran masyarakat yang lebih luas. Oleh karenanya, Azyumardi Azra

mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang komprehensif.²³ Melalui pendidikan, masyarakat dipersiapkan untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Melalui dunia pendidikan, individu akan terus belajar menyesuaikan diri dengan cita-cita, nilai, harapan masyarakatnya yang lebih luas. Yang patut dicatat di sini, nilai-nilai dan cita-cita tersebut adalah sesuatu yang *taken for granted*, ada sebelum individu lahir, dan proses pendidikan adalah penyesuaian diri dengan lingkungannya yang sudah dipadati oleh cita-cita dan harapan tersebut.

Kebudayaan itu sendiri, menurut Budiono Herusatoto yang mengutip S. Padmosoekotjo, adalah sifat atau keadaan dari budi yang disebut nalar atau pendidikan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam bukunya *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* berpendapat bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.²⁴ Cita-cita, harapan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat lahir dari kebudayaan mereka. Dari sinilah, boleh dikata bahwa pendidikan bukan saja tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan melainkan juga kebudayaan manusia itu sendiri. 'Ruh' kebudayaan menjadi penggerak bagi 'jasad' dunia pendidikan. Tanpa nilai-nilai budaya yang melatar-belakanginya maka dunia pendidikan bagaikan jasad tanpa ruh. Bahkan, jika dunia pendidikan secara manipulatif-politis dilepaskan dari nilai-nilai budaya sendiri maka yang akan terlahir adalah manusia-manusia yang terasing, yang kehilangan jati diri, yang terombang ambing oleh arus informasi dan budaya asing.

Permasalahan menjadi sedikit lebih rumit apabila dimunculkan sebuah pertanyaan yang membenturkan pendidikan dengan wacana eksistensi kebudayaan Nusantara yang beragam. Apakah pendidikan berbasis budaya berarti pendidikan berbasis nilai-nilai lokalitas? Apakah pendidikan berbasis budaya berarti meniscayakan desentralisasi dan menghendaki otonomi pendidikan? Apakah pendidikan berbasis budaya berarti tidak-adanya standar nilai bersama, khususnya mengenai nilai-nilai yang akan diperjuangkan bersama melalui media pendidikan?

Dalam atmosfer yang demokratis, perbedaan memang dihargai. Dunia pendidikan juga seharusnya meningkatkan upaya menghargai perbedaan kultural. Penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan mulai dari tingkat paling dasar sampai yang tertinggi harus mengutamakan dan menghormati adanya perbedaan kebudayaan tersebut. Dalam atmosfer yang demokratis, nilai-nilai lokalitas betul-betul harus dijunjung tinggi. Ini berarti bahwa pendidikan berbasis budaya, pada tataran yang lebih spesifik, adalah model pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai

lokalitas. Penghargaan terhadap nilai-nilai lokalitas ini diwujudkan dengan adanya kebijakan otonomi pendidikan, dimana setiap daerah diizinkan untuk memformulasikan sendiri konsep pendidikan yang akan dijalaninya. Sekalipun, menurut sebagian pakar, otonomi pendidikan yang sedang berlangsung sekarang masih setengah hati.²⁵

Namun, terlepas dari penilaian tersebut, pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang mendorong desentralisasi, dimana setiap anak suku berhak atas budaya mereka masing-masing. Ki Hadjar Dewantara menyerukan, “Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan.”²⁶ Bentangan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke adalah wadah yang menampung beragam kebudayaan; kebudayaan yang lahir dari suku bangsa yang berbeda-beda pula. Mereka semua mendapatkan hak yang sama untuk menghayati, mengamalkan, dan menyelami lebih dalam kebudayaan masing-masing. Pendidikan sebagai media, sebagai instrumen, sebagai alat harus ditempatkan pada peranannya sendiri, yaitu membantu masyarakat untuk memperoleh, mengetahui, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang mereka miliki. Inilah substansi makna kemerdekaan yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara, sehingga manusia betul-betul berjalan searah tuntutan kodrat alam dan kebudayaan yang ada di sekeliling mereka.

Dengan sangat bagus dan rigid, A. Waidl menjabarkan bahwa: pertama, manusia adalah makhluk sejarah. Manusia itu mampu melakukan refleksi diri, mampu keluar dari dirinya, dan melihat ke belakang, kemudian mengadakan perenungan sebagai koreksi terhadap masa lalu demi sebuah upaya konstruktif di masa mendatang. Kedua, manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya, yang memiliki ciri-ciri khas dalam konteks lokalitas tertentu, sehingga mereka bukan lagi objek pendidikan yang diarahkan melainkan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, dihargai, dan bermatabat. Ketiga, manusia selalu membutuhkan sosialisasi untuk menyatakan eksistensi dirinya. Karenanya, manusia harus diberi tempat untuk menyatakan dirinya saat berhubungan dengan publik yang lebih luas. Pengakuan publik sangatlah penting bagi dirinya. Keempat, manusia berinteraksi dengan alam lingkungannya, karenanya muncul kerja yang berdimensi kemanusiaan. Hal ini merupakan perpaduan antara budi dan rasa yang berdaya untuk menafsiri dunia dan kehidupannya.²⁷

Kutipan panjang dari penjelasan A. Waidl adalah penjabaran mengenai makna kebebasan manusia, kebebasan berekspresi untuk menampilkan kebudayaannya sendiri, kebutuhan manusia akan adanya penghargaan publik atas eksistensi dirinya. Dan dengan begitu, betul apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa manusia harus diberi kebebasan namun bukan kebebasan yang tanpa batasan, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh dan untuk nilai-nilai kebudayaan. Sejalan dengan ini, Romo Mangun memberikan penjelasan detail mengenai apa yang harus dilakukan terhadap peserta-didik. Menurut Romo Mangun, peserta-didik mempunyai keinginan untuk mengeksplorasi dirinya dan alam sekitarnya. Peserta-didik ingin mengembangkan dirinya sendiri.²⁸ Mengeksplorasi diri dan alam sekitarnya adalah cerminan dari kebebasan untuk merasakan kebudayaannya sendiri, perjuangan akan nilai-nilai lokalitas, sehingga penyeragaman adalah bentuk 'distorsi'.

Pendidikan berbasis budaya berarti pendidikan yang memfasilitasi dan membantu peserta-didik untuk mengeksplorasi diri dan nilai-nilai kebudayaannya. Karena itulah, Romo Mangunwijaya memiliki pemahaman bahwa kelas harus diselenggarakan demi membantu peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya, kemampuan-kemampuan yang dibawanya sejak lahir, dan selanjutnya diramu atau dipadukan bersama kekayaan sosial dan budaya dimana peserta-didik tersebut lahir, tumbuh, dan dibesarkan di dalamnya. Akhirnya, Romo Mangun menganggap pendidikan dan kebudayaan (lokalitas) memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan.²⁹ Dengan kata lain, pendidikan harus menyertakan nilai-nilai budaya saat mengiringi langkah pertumbuhan intelektual, emosional, dan spiritual peserta-didik.

Pertanyaan lebih lanjut, dari tempat-tempat manakah nilai-nilai kebudayaan digali? Siapa pula yang bertanggungjawab menyelenggaraan pendidikan secara umum? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu sekali melirik konsep trilogi pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara. Konsep trilogi yang dimaksud adalah untuk menjelaskan mekanisme bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan serta menumbuhkan karakter dan membina mentalitas generasi mudahnya. Rumah, sekolah, dan kehidupan bermasyarakat adalah 'tempat-tempat' nilai-nilai kebudayaan itu digali, dirumuskan, dan ditanamkan. Orang tua, guru atau pengajar, dan masyarakat adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. Setiap individu manusia hidup dimulai dari usia kecil dan terus tumbuh berkembang sampai dewasa. Sepanjang pertumbuhan itulah, proses pendidikan

tetap dilangsungkan. Alhasil, Pendidikan seorang anak tergantung sepenuhnya kepada trilogi pendidikan tersebut.³⁰ Dan dengan begitu, proses pendidikan juga akan berlangsung sepanjang hayat (*longlife education*).

Secara tidak langsung, konsep trilogi pendidikan Ki Hadjar Dewantara ini, dengan sendirinya, merupakan landasan filosofis yang sangat kuat bagi pendidikan berbasis budaya. Rasionalisasinya begini, seorang anak lahir dari sebuah keluarga, dan keluarga tersebut adalah bagian dari masyarakat yang sudah memiliki seperangkat sistem nilai yang baku. Sekolah adalah ‘rumah kedua’, yang bertugas menanamkan nilai-nilai budaya yang sudah terdapat di tengah-tengah masyarakat kepada peserta-didik. Di luar rumah dan sekolah, manusia hidup dan menjalani langsung pendidikan dari masyarakatnya. Dengan demikian, seorang individu tidak bisa lepas dari lingkaran nilai kebudayaannya sendiri. Selagi pendidikan diselenggarakan maka nilai-nilai kebudayaan akan mengalami proses transformasi. Dengan catatan penting, orang tua, guru-pengajar, dan masyarakat berkomitmen bersama, bekerjasama, bahu-membahu untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang positif dan membangun mentalitas generasi muda yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebudayaannya. Sebab, nilai-nilai tersebut sudah berupa sistem yang kokoh, tinggal menunggu kemauan mengimplementasikannya.

Nilai-nilai Budaya Cirebon

Kota Cirebon memiliki kebudayaan yang lestari sampai hari ini. Nilai-nilai kebudayaan Cirebon tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya, dihayati dalam keyakinan, dan dijalankan dalam kehidupan. Secara garis besar, spirit agama dan spirit modernitas menjadi dua prinsip utama dalam memahami nilai-nilai kebudayaan Cirebon. Nilai-nilai agama maupun nilai-nilai modernitas telah berpadu dan berkolaborasi, yang kemudian selalu tampak dalam perjalanan historisitas pembentukan kebudayaan Cirebon. Untuk melihat kedalaman nilai-nilai kebudayaan Cirebon secara lebih komprehensif, dua paradigma besar ini; agama dan modernisme, tidak boleh diabaikan.

Untuk membuktikan bahwa nilai-nilai agama maupun modernisme merupakan unsur terpenting dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon, disiplin sejarah dan disiplin kesenian akan banyak membantu. Berdasarkan fakta-faktor sejarah dan produk-produk kesenian yang terdapat dalam masyarakat Cirebon, nilai-nilai agama dan nilai-nilai modernisme tampak lebih kentara.

Pertama, Sejarah. Sejarah mencatat bahwa Kota Cirebon sejak abad ke-16 telah muncul sebagai salah satu kota pelabuhan penting di pantai utara Jawa.

Sebagai kota pelabuhan, masyarakatnya lebih terbuka, rasional, plural, dan lebih siap menerima kehadiran yang lain (*the others*). Berdasarkan berita yang disampaikan oleh Tome' Pires, pada paruh kedua abad ke-16, Pelabuhan Cirebon telah menjadi salah satu bandar niaga yang berperan penting dalam perdagangan internasional.³¹ Dengan ibarat lain, kota Cirebon merupakan tempat perjumpaan beragam etnik, ras, suku bangsa, beserta kebudayaan masing-masing.

Sebagai kota Pelabuhan, kota Cirebon sudah tentu merupakan kota bertemunya berbagai kelompok sosial. Kehadiran penduduk dengan latar belakang yang beragam, baik etnik, agama, kebudayaan, dan sebagainya merupakan bagian dari karakteristik kota Cirebon. Arus informasi dan nilai-nilai kebudayaan asing bermuara di pelabuhan Cirebon ini. Boleh dikata, pada waktu itu kota Cirebon menjadi miniatur dunia, dimana 'globalisasi' dalam tingkat yang kecil telah dipraktekkan. Mungkin pakar setingkat Prof. George Ritzer mengatakan bahwa globalisasi menelorkan kehampaan identitas, dimana masyarakat berubah dengan cepat, sehingga kadang-kadang manusia kehilangan identitasnya dan terhempas di dalam dunia yang kosong.³² Akan tetapi, dengan karakteristiknya yang kuat, masyarakat Cirebon dapat menerima perubahan cepat yang dibawa oleh arus globalisasi namun tetap mampu mempertahankan identitas dan jati diri bangsanya.

Keterbukaan, dinamisme, progresifitas kebudayaan masyarakat Cirebon juga tampak terlihat pada adanya pergeseran mendasar yang terjadi. Pada awal abad ke-20, terutama setelah ditetapkan sebagai *gemeente*, Kota Cirebon berkembang sebagai kota kolonial yang mengalami proses modernisasi yang pesat. Kota Cirebon mengalami pergeseran-pergeseran yang mendasar dari sebuah kota suci tradisional yang berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam (*secured city*), sekaligus pusat aktifitas perdagangan laut (*market city*) menjadi sebuah kota kolonial (*colonial city*).³³ Kolonialisasi, di samping membawa dampak buruk, juga menjadi batu loncatan bagi percepatan modernisasi. Bangsa Eropa yang lebih maju secara kebudayaan telah memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih rasional dan terorganisir dengan lebih baik.

Pergeseran dari kota suci menjadi kota dagang ini adalah ciri khas masyarakat yang terbuka (*open society*),³⁴ menghargai perubahan-perubahan yang mengarah ke pembentukan pola hidup yang lebih baik, yang lebih harmonis, dan lebih mencerminkan perdamaian. Dengan identitas sebagai kota pelabuhan, masyarakat Cirebon telah memastikan diri untuk menjadi lebih terbuka. Jika dirunut dari perkembangan sejarah sejak awal abad ke-20, Kota Cirebon telah

menjelma menjadi sebuah kota pelabuhan ekspor dan impor terbesar ke-4 di Indonesia setelah Batavia, Surabaya, dan Semarang.³⁵

Sebagai masyarakat yang modernis, adat-budaya Cirebon sudah tentu tidaklah magis melainkan bersifat sangat rasional, tidak kaku melainkan selalu elastis untuk menerima perubahan sebagai tuntutan prinsip-prinsip modernitas pada jamannya. Boleh dikata, kota Cirebon telah mencapai era postmo dibanding kota-kota lain di Nusantara, dan karenanya, memiliki tingkat perekonomian yang tinggi dengan laju perubahan yang cepat. Kota Cirebon merupakan ibukota Keresidenan Cirebon, sebuah wilayah yang juga termasuk dalam mata rantai ekonomi perkebunan kolonial sehingga terdapat konsentrasi kapital kolonial yang cukup besar, dan karenanya memiliki dinamika sosial ekonomi yang relatif tinggi.³⁶

Sebagian pakar memang ada yang pesimis dengan budaya global yang komersialistis. Akan tetapi, di balik topeng buruk globalisasi itu tersimpan kreatifitas dan produktifitas. Selagi mampu melakukan filterisasi terhadap dampak-dampak negatif globalisasi dan mengambil sisi-sisi positifnya, maka kehadiran globalisasi bukan sesuatu yang menakutkan. Terbukti, budaya Cirebon tetap memiliki karakteristiknya yang khas sekalipun gempuran modernitas berlangsung keras pada waktu itu. Tetapi, masyarakat Cirebon berhasil menggali sisi-sisi positif 'globalisasi' pada masa itu.

Berdasarkan catatan sejarah, Karesidenan Cirebon telah mengembangkan aktifitas ekonomi perkebunan yang luar biasa. Kehadiran ekonomi perkebunan tebu dan komoditas komersial-ekspor lainnya seperti kopi dan indigo menciptakan perbuahan-perubahan besar dalam kehidupan petani lokal. Berkembangnya ekonomi perkebunan di wilayah Karesidenan Cirebon mendorong para petani lokal untuk melakukan komersialisasi produk pertanian dan lainnya.³⁷ Ini adalah bukti bahwa tuntutan kreatifitas dan produktifitas yang dibawa modernitas dan globalisasi berhasil diserap dengan baik. Dan, bersamaan dengan itu, masyarakat Cirebon tetap menjaga dan melestarikan budayanya sendiri, yakni budaya Cirebon yang khas, yang bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sumatera, bukan Timur Jauh, bukan pula Eropa.

Di samping telah modern dalam segi perekonomian dan perdagangan, masyarakat Cirebon memiliki nilai budaya lain, yakni sebagai masyarakat yang pluralis, demokratis, humanis. Sejak awal masyarakat Cirebon telah menghargai pluralisme kebudayaan, menjunjung nilai-nilai demokratis, dan bersikap lebih humanis dalam menyikapi perbedaan. Berdasarkan catatan sejarah, secara

administratif, distrik kota Cirebon terdiri dari 71 desa dengan jumlah penduduk 71.000 jiwa, yang terdiri dari 500 orang Eropa, 3.500 orang Tionghoa, 1.100 orang Arab, dan 170 orang Asia Timur lainnya, serta sisanya penduduk pribumi.

Kota Cirebon boleh dikata sebagai 'Kota Kebudayaan'. Dari segi bahasa yang digunakan, kota Cirebon menjadi sentra dimana berbagai bahasa dapat ditemukan. Di bagian selatan wilayah Cirebon ini terdapat penduduk yang berbicara dalam bahasa Sunda, sedangkan di wilayah utara penduduknya menggunakan jenis bahasa Jawa yang memiliki dialek khas, di Afdeeling Indramayu terdapat dialek Indramayu, di sebelah utara Afdeeling Cirebon terdapat dialek Cirebon, dan di ujung timur karesidenan, di distrik Losari terdapat dialek Tegal.³⁸

Inilah gambaran singkat yang ditampilkan sejarah untuk membuktikan bahwa kebudayaan Cirebon adalah kebudayaan yang modernis, lahir dari prinsip-prinsip modernisme, bahkan mendekati prinsip *post-modernism*, dimana yang modern maupun tradisional dihargai secara adil. Karena itulah, sekalipun masyarakat Cirebon menerima sisi-sisi positif modernitas namun nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan dengan baik, sehingga sintesis dan perpaduan antara tradisionalisme dan modernisme ini melahirkan budaya baru yang disebut budaya Cirebon. Mengenai nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan seiring bersama perjalanan modernitas tersebut, dapat dilihat pada produk-produk kesenian budaya Cirebon.

Kedua, Kesenian. Kesenian adalah sub-sistem dari kebudayaan masyarakat Cirebon. Produk-produk kesenian masyarakat Cirebon lebih mewakili atau merepresentasi adanya nilai-nilai budaya yang tradisional. Nilai-nilai tradisional ini tetap ada dan dilestarikan sekalipun pada saat yang sama nilai-nilai modernitas telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu dibuktikan dari kegemaran masyarakat terhadap kesenian lokal sekalipun mereka telah disibukkan dengan aktifitas-aktifitas perdagangan tingkat internasional pada masa itu.

Seorang pakar kebudayaan, A. Chozin Nasuha, mengatakan bahwa gerakan-gerakan kesenian yang terdapat di kalangan masyarakat Cirebon dikaitkan pada karakteristik yang khas, yaitu bersifat ritual yang menyentuh nilai-nilai *animisme-dinamisme*. Ciri khas religi *animisme-dinamisme* adalah menganut kepercayaan bahwa ruh itu tidak mati dan semua bersifat aktif. Mereka berpendapat bahwa ruh orang mati tetap hidup dan menjadi saksi seperti dewa, bias mencelakakan atau mensejahterakan masyarakat. Menurut mereka,

sebenarnya dunia ini dihuni oleh ruh-ruh ghaib yang mengganggu atau membantu kehidupan masyarakat.³⁹

Tidak hanya nilai-nilai tradisional animisme-dinamisme, nilai-nilai tradisional Islam juga menjadi spirit utama dalam batang tubuh kesenian masyarakat Cirebon. A. Chozin Nasuha menulis, “Kesenian Cirebon banyak dimunculkan dari simbol kosmis dan simbol ajaran Islam. Simbol kosmis diwujudkan dalam bentuk payung sutera berwarna kuning dengan kepala naga. Payung ini melambangkan perlindungan dari raja kepada rakyatnya. Simbol-simbol yang berasal dari ajaran Islam dibagi menjadi empat tingkat, yaitu *syari’at*, *tarekat*, *hakikat*, dan *ma’rifat*. *Syari’at* disimbolehkan oleh pertunjukan Wayang. *Tarekat* disimbolkan dalam bentuk Tari Barongan. *Hakikat* disimbolkan dalam bentuk Tari Topeng. *Ma’rifat* disimbolkan dalam bentuk tari Tayub atau Tari Ronggeng.”⁴⁰

Gerakan-gerakan kesenian tari yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Cirebon menyimpan nilai-nilai tradisional, baik yang berasal dari simbolisme Islam maupun kepercayaan-kepercayaan lain yang sudah dimodifikasi. Kesenian masyarakat Cirebon mencerminkan bahwa unsur-unsur agama dan nilai-nilai tradisional masih dipegang teguh sebagai spirit utama dalam pembentukan kebudayaan Cirebon. Kehadiran nilai-nilai agama dan tradisionalisme tidak berbenturan dengan masyarakat yang sudah mulai menerima modernisme. Bahkan, nilai-nilai agama berjalan seirama dengan nilai-nilai modernitas, dan kebudayaan masyarakat Cirebon menjadi bukti konkret adanya sistesa dua nilai tersebut.

Penafsiran Nilai Kebudayaan Dalam Konteks Pendidikan Berbasis Budaya

Budaya Cirebon adalah budaya masyarakat yang agamis-tradisionalis sekaligus modernis. Nilai-nilai agama dan tradisionalisme berpadu dengan nilai-nilai modernisme. Sintesa antara agama dan modernitas ini adalah prinsip utama dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon. Pendidikan yang memiliki orientasi mencetak individu-individu yang dewasa, kritis, sadar akan diri, masyarakat, dan lingkungannya, dapat berpijak pada nilai-nilai yang digali dari kebudayaan Cirebon tersebut. Dengan kata lain, pendidikan berbasis budaya Cirebon adalah pendidikan yang mengakomodir nilai-nilai agama-tradisional sekaligus nilai-nilai modernitas.

Budaya Cirebon lahir dari progresifitas dan kreatifitas masyarakat. Karenanya, budaya Cirebon adalah budaya yang progresif dan kreatif-produktif.

Pendidikan berbasis budaya Cirebon harus mencerminkan progresifitas dan kreatifitas tersebut. Namun di samping itu juga, budaya Cirebon sarat dengan ruh-ruh keagamaan dan kepercayaan. Karenanya, pendidikan berbasis budaya Cirebon tetap menjadikan agama sebagai pegangan utama dalam mengaruhi arus besar modernitas beserta segala atributnya.

Budaya Cirebon lahir di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, demokratis, dan humanis. Masyarakat yang heterogen turut berperan penting dalam proses pembentukan kebudayaan Cirebon, dan mereka hidup rukun serta saling menghargai satu sama lain, sehingga masyarakat Cirebon yang unik itu menjadi ada dan nyata. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis budaya Cirebon hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, demokrasi, dan pluralisme. Pendidikan berbasis budaya Cirebon adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, bakat maupun kemampuan, memberikan kebebasan berekspresi bagi setiap peserta didik, dan bersifat humanis.

Kesimpulan

Pendidikan adalah upaya sadar untuk menciptakan individu yang sadar, dewasa, dan kritis. Pendidikan tidak hanya proses transformasi informasi-informasi melainkan juga penanaman nilai-nilai budaya. Karena itulah, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai kebudayaan tertentu. Budaya Cirebon adalah salah satu di antara sekian banyak kebudayaan yang menjadi kekayaan Nusantara. Budaya Cirebon memiliki nilai-nilai yang khas dan unik, yaitu perpaduan atau sintesa antara tradisionalisme (agama) dan modernitas. Pendidikan berbasis budaya Cirebon, dengan begitu, adalah pendidikan yang mampu memadukan nilai-nilai modernitas dan tradisional. Hal ini menjadi penting. Sebab, peserta didik memang dituntut untuk kuat memegang jati diri namun tidak kaku dalam menghadapi perubahan dan tuntutan jaman yang sangat cepat ini. Alhasil, nilai-nilai budaya Cirebon sangat pas untuk melandasi setiap usaha dunia pendidikan.

Endnote

¹ A. Chozin Nasuha, "Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon" dalam *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10*, Banjarmasin 1-4 November 2010, hal. 1

² Dadang Kusnandar, "Budaya Cirebon: Posmo Pada Masanya" dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/07/budaya-cirebon-posmo-pada-masanya/>, diunduh pada 11 Oktober 2012

³ Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Voices in Education*, (Boston: Allyn & Beacon, 2004), hal. 84-106

⁴ Joy A. Palmer (ed.) (Ed), *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang*, terj. Farid Assifa, (Yogyakarta: Jendela, 2005), hal. 75

⁵ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 54-55

⁶ Lihat penjelasan panjangnya dalam H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

⁷ Joy A. Palmer (ed.) (Ed), *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang*, hal. 75

⁸ Gerald L. Gutek, *Philosophical and Ideological Voices in Education*, hal. 215-235.

⁹ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 3

¹⁰ Mansour Fakih, *Jala Lain, Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hal. 111-112

¹¹ Lihat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999, UUD 1945, Amandemen I, II, III, IV, (Surabaya: Penerbit Apollo, t.t), hal. 55

¹² Moh. Yamin, "Pendidikan Antikorupsi: Hal yang Niscaya" dalam *Jawa Pos*, 5 Juli 2008

¹³ Prof. Dr. Djohar, M.S., Kata Pengantar dalam *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Globalisasi*, Mustafa Rembang, (Yogyakarta; TERAS, 2008), hal. xvi-xvii

¹⁴ Abd Rachman Assegaf, dalam Kata Pengantar buku *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Globalisasi*, Mustafa Rembang, (Yogyakarta; TERAS, 2008), hal. xxvi

¹⁵ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, (Harmondsworth: Penguin, 1982), hal. 25

¹⁶ Pembahasan mengenai tiga tipologi pendidikan yang digagas oleh Paule Freire ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam W.A. Smith, *The Meaning fo Consciencientizacao: The Goal of Paule Freire's Pedagogy*, (Ahmherst: Center for International Education, UMASS, 1976).

¹⁷ Mansour Fakih, *Jala Lain, Manifesto Intelektual Organik*, hal. 123-124

¹⁸ Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 107

¹⁹ Lihat Joy A. Palmer, *50 Pemikir dari Piaget Sampai Masa Sekarang*, hal. 331-332

²⁰ Pengibartan lembaga pendidikan sebagai penjara dapat ditelusuri lebih lanjut dalam artikel yang ditulis oleh Moh. Yamin, "Sekolah adalah Penjara" dalam *Banjarmasin Post*, 17 Juli 2007.

²¹ Konsep tentang defisit kemanusiaan ini disampaikan oleh Michael Rutz, “Erziehung 2000: Der Schuler als End-produkt”, dalam majalah *Rheinischer Merkur*, 2000, hal. 21

²² H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 56

²³ Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 4

²⁴ Budiono Herusatoto, *Simbolisme Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hal. 8-10

²⁵ Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 17

²⁶ I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Penerbit CV Ilmu, 1976, cet. Ke-10), hal. 175-176

²⁷ A. Waidl, “Pendidikan yang Memahami Manusia”, dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 22-23

²⁸ Y.B. Mangunwijaya, *Pendidikan Pemertdekaan*, (Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar, 2004), hal. 37-48

²⁹ *Ibid.*

³⁰ St. Andreas, *Trilogi Pendidikan dan Konsep Pendidikan yang Berkesinambungan*, (Media Komunikasi Paroki Kedoya: Warta Andreas, No. 07 Th XVII Juli 2003).

³¹ Adeng, Wiwi Kuswiyah, et al, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI, 1998), hal. 50-51

³² Lihat kritik pesimis yang dilontarkan George Ritzer tentang dampak globalisasi ini dalam bukunya *The Globalization fo Nothing*, terjemahan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).

³³ *Ibid.* hal. 48-50

³⁴ Karl R. Popper, *The Open Society and Its Enemies*, terj. Uzair Fauzan, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213.

³⁵ Singgih Tri Sulistiyo, “Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon, 1850-1930” (Tesis S-2 Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 1994), hal. 179

³⁶ Lihat uraian panjangnya dalam karya Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa pada Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

³⁷ Mengenai ekonomi perkebunan ini dibahas secara tuntas dalam keseluruhan tesis yang dikarang oleh M.R. Frenando, *Peasants and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Resedency From Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century* (Tesis Ph. D yang tidak diterbitkan, Monash University, 1982)

³⁸ Abdul Wahid, *Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hal. 26-27

³⁹ A. Chozin Nasuha, “Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon”, hal. 3

⁴⁰ *Ibid.*

Daftar Pustaka

- A. Chozin Nasuha. (2010) “Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon” dalam *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10*, Banjarmasin 1-4 November.
- A. Palmer, Joy. (2005). *50 Pemikir Pendidikan dari Piaget sampai Masa Sekarang*. terj. Farid Assifa, Yogyakarta: Jendela.
- Andreas, St. (2003) *Trilogi Pendidikan dan Konsep Pendidikan yang Berkesinambungan*, Media Komunikasi Paroki Kedoya: Warta Andreas, No. 07 Th XVII Juli.
- Assegaf, Abd, Rachman. (2008). dalam Kata Pengantar buku *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Globalisasi*. Mustafa Rembangy, Yogyakarta: TERAS
- Azra, Azyumardi. (1999) *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djohar. (2002) Kata Pengantar dalam *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Globalisasi*. Mustafa Rembangy. Yogyakarta: TERAS
- Djumhur dan Danasuparta. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV Ilmu.
- Fakih, Mansour. (2002). *Jala Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Freire, Paulo. (1982). *Pedagogy of the Oppressed*. Harmondsworth: Penguin
- H. Gunawan, Ary. (2000). *Sosiologi Pendidikan: suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Herusatoto, Budiono. (2008). *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Kusnandar, Dadang. (2012). “Budaya Cirebon: Posmo Pada Masanya” dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/07/budaya-cirebon-posmo-pada-masanya/>, diunduh pada 11 Oktober 2012
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999, UUD 1945, Amandemen I, II, III, IV. Surabaya: Penerbit Apollo.
- L. Gutek, Gerald. (2004). *Philosophical and Ideological Voices in Education*. Boston: Allyn & Beacon.

-
- Mangunwijaya, Y. B. (2004). Mangunwijaya, *Pendidikan Pemerdekaan*. Yogyakarta: Dinamika.
- Michael Rutz, “Erziehung 2000: Der Schuler als End-produkt”, dalam majalah *Rhenischer Merkur*, 2000.
- Moh. Yamin, “Sekolah adalah Penjara” dalam *Banjarmasin Post*, 17 Juli 2007.
- Moh. Yamin, “Pendidikan Antikorupsi: Hal yang Niscaya” dalam *Jawa Pos*, 5 Juli 2008.
- Ritzer , George. (2005). *The Globalization fo Nothing*, terjemahan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Susetyo, Benny. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LkiS.
- Susetyo, Y. (2005). *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Pendidikan Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. (2003). Bandung: Fokusmedia.
- Waidl, A. (2000). Pendidikan yang Memahami Manusia. dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wiwi Kuswiyah, Adeng. (1998). et al, *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*, Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI,